

## **PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SETELAH PANDEMI COVID-19**

**Adhe Bagus Riady<sup>1\*</sup>, Lince Bulutoding<sup>2</sup>, Namla Elfa Syariati<sup>3</sup>.**

<sup>1, 2, 3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

[1adhebagusriady63@gmail.com](mailto:1adhebagusriady63@gmail.com) [2lincebulutoding20@gmail.com](mailto:2lincebulutoding20@gmail.com) [3namla.elfa@uin-alauddin.ac.id](mailto:3namla.elfa@uin-alauddin.ac.id)

**Abstract,** *This research aims to analyze the comparison of the financial performance of the North Kolaka Regency Regional Government before and after the COVID-19 pandemic. The data used in this research is secondary data obtained from the annual financial reports of the North Kolaka Regency Regional Government for the 2018-2019 and 2021-2022 periods. The data analysis method used is the Paired Sample T-Test hypothesis test to compare the averages of financial variables before and after the COVID-19 pandemic. The research results show that overall there is no significant difference in the financial performance of the North Kolaka Regency Regional Government before and after the COVID-19 pandemic, with a significance value (sig) greater than 0.05. However, there were fluctuations in several financial performance variables between the periods before and after the COVID-19 pandemic. The variables observed include the degree of fiscal decentralization, regional financial dependence, regional financial independence, operating and capital expenditure, efficiency, effectiveness and regional financial growth.*

**Keywords:** Degree of fiscal decentralization, regional financial performance, Covid-19 pandemic, regional financial growth, North Kolaka

**Abstrak,** ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebelum dan setelah terjadinya pandemi COVID-19. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk periode tahun 2018-2019 dan 2021-2022. Metode analisis data yang digunakan adalah uji hipotesis Paired Sample T-Test untuk membandingkan rata-rata variabel keuangan sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebelum dan setelah pandemi COVID-19, dengan nilai signifikansi (sig) lebih besar dari 0,05. Namun, terdapat fluktuasi dalam beberapa variabel kinerja keuangan antara periode sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Variabel-variabel yang diamati meliputi derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, belanja operasi dan modal, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Desentralisasi fiskal, kinerja keuangan daerah, pandemi covid-19, pertumbuhan keuangan daerah, kolaka utara.

### **PENDAHULUAN**

Munculnya pandemi covid-19 sejak Desember 2019 telah mengubah paradigma global dan menimbulkan respon luar biasa di seluruh dunia. Virus yang bermula di Wilayah Wuhan China, dengan cepat menyebar tanpa terkendali, memaksa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020 untuk menetapkan covid-19 sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan. Melihat tingkat penyebaran yang cepat dan jumlah korban yang signifikan, kemudian pada 11 Maret 2020, WHO

\*Koresponden

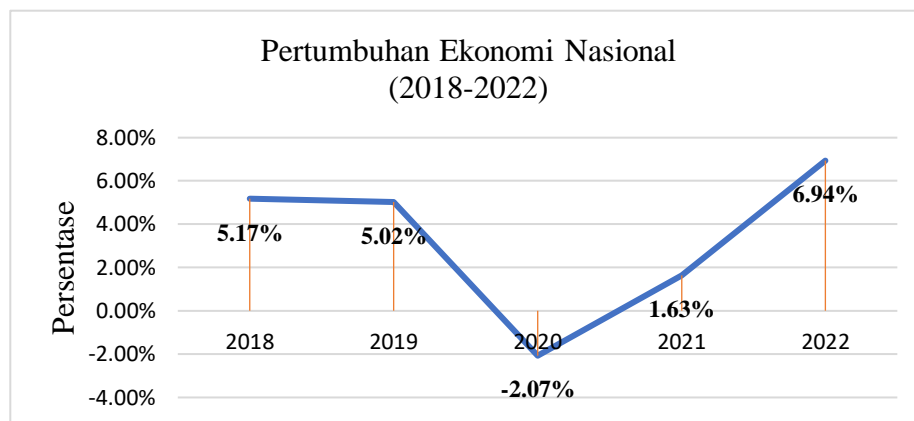
Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

menyatakan covid-19 sebagai pandemi global. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pemerintah merespon pandemi ini dengan mengimplementasikan kebijakan social distancing, yang bertujuan untuk meminimalkan penyebaran virus dengan menjaga jarak antarindividu (Wahyuningsih, 2020).

Kebijakan ini, diterapkan sejak awal Maret 2020, berdampak luas termasuk penutupan sementara sekolah, tempat kerja, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembatalan pertemuan massa, perbatasan perjalanan, dan penerapan karantina. Konsekuensi dari kebijakan social distancing ini tak hanya terasa di sektor kesehatan, melainkan juga menciptakan dampak signifikan pada sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara terdampak mengalami perlambatan dan penurunan, seperti yang terjadi pada Indonesia dengan kontraksi minus 2,07% pada akhir 2020. Lockdown dan penurunan aktivitas publik mempengaruhi roda perekonomian dalam negeri, khususnya sektor pariwisata yang mengalami penurunan tingkat kunjungan baik dari wisatawan domestik maupun asing (Vebiani et al., 2022).

Akibatnya, sektor bisnis wisata seperti akomodasi, restoran, dan transportasi mengalami dampak terbesar, merusak sistem perekonomian di Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia, yang bertujuan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengalami krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 (Gumanti et al., 2018). Krisis kesehatan ini memberikan dampak signifikan pada aspek perekonomian dunia, termasuk Indonesia, seperti yang tergambar dari grafik pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun sejak 2018-2020 menurut Badan Pusat Statistik 2023. Hal ini ditunjukkan dalam gambar 1.1 berikut:

**Gambar 1. 1**  
**Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nasional (2018-2022)**



Merosotnya kondisi ekonomi pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan, seperti refocusing dan realokasi anggaran, untuk mengatasi dampak pandemi. Instrumen-instrumen kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Presiden No.82 Tahun 2020 dan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020. Peningkatan kasus covid-19 juga berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi daerah guna meningkatkan PAD sebagai cermin kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Vebiani et al., 2022).

Salah satu daerah yang terdampak adalah Kabupaten Kolaka Utara, yang mengalokasikan dana signifikan untuk menangani dan memulihkan ekonomi akibat covid-19. Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, mencatat bahwa refocusing anggaran mengakibatkan perubahan signifikan dalam alokasi dana, dengan penurunan sebesar Rp. 955 miliar. Meskipun demikian, total anggaran yang dikalkulasikan masih mencapai Rp. 1,16 triliun, menunjukkan respons pemerintah terhadap perubahan prioritas akibat pandemi (Halim et al., 2022).

Salah satu daerah yang terdampak adalah Kabupaten Kolaka Utara, yang mengalokasikan dana signifikan untuk menangani dan memulihkan ekonomi akibat covid-19. Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, mencatat bahwa refocusing anggaran mengakibatkan perubahan signifikan dalam alokasi dana, dengan penurunan sebesar Rp. 955 miliar. Meskipun demikian, total anggaran yang dikalkulasikan masih mencapai Rp.

1,16 triliun, menunjukkan respons pemerintah terhadap perubahan prioritas akibat pandemi (Halim et al., 2022).

Memperhatikan kondisi keuangan pemerintah daerah dan pandemi Covid-19, beberapa studi tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan pemerintah telah dihasilkan antara lain: Penelitian pertama oleh (Vebiani et al., 2022) mengenai Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat, dapat diambil kesimpulan bahwa pandemi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sebagaimana diukur melalui beberapa indikator yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi Perbedaan yang mencolok terlihat dalam rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah antara periode sebelum dan selama pandemi Covid-19. Penurunan pada kedua rasio tersebut mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjaga tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di tengah situasi krisis yang diakibatkan oleh pandemi.

Namun, tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan daerah dilihat dari rasio kemandirian keuangan dan rasio derajat desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah pandemi. Meskipun demikian, terdapat perbaikan pada rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal selama pandemi, menunjukkan upaya dan keberhasilan daerah dalam meningkatkan tingkat kemandirian keuangan dan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya fiskal. Penting untuk dicatat bahwa perbaikan pada aspek kemandirian dan desentralisasi fiskal tidak secara langsung berkorelasi dengan kinerja keseluruhan. Dalam konteks ini, pandemi telah memberikan pengaruh yang kompleks terhadap manajemen keuangan daerah, dengan beberapa aspek mengalami perbaikan sementara yang lain mengalami penurunan. Memberikan sejumlah manfaat teoritis yang dapat memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait manajemen keuangan publik. Beberapa manfaat teoritis potensial dari penelitian tersebut adalah Pengembangan Teori Tanggung Jawab..

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Teori Tanggung jawab**

Teori tanggung jawab dalam konteks pemerintah daerah menurut menurut Abdullah (2018) merujuk pada konsep alokasi tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan kinerja. Pemerintah daerah menerapkan teori ini dan menganggap setiap unit atau bagian sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab spesifik terkait dengan pengelolaan keuangan dan pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dalam pandangan pemerintah daerah penerapan teori tanggung jawab menjadi landasan untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam pandangan pemerintah daerah penerapan teori tanggung jawab menjadi landasan untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penerapan teori tanggung jawab memberikan pemerintah daerah kerangka kerja yang jelas untuk mengukur dan menilai kinerja setiap unit atau departemen, baik dari segi keuangan maupun pencapaian tujuan-tujuan strategis. Dengan memberikan tanggung jawab yang spesifik pada setiap unit, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas manajemen di tingkat lokal.

### **Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Kiesso (2007:2) mendefinisikan laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter". Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih

dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Tujuan analisis laporan keuangan mempunyai maksud untuk menegaskan apa yang diinginkan atau diperoleh dari analisis yang dilakukan. Dengan adanya tujuan, analisis selanjutnya akan dapat terarah, memiliki batasan dan hasil yang ingin dicapai (Maith, 2013).

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi, organisasi yang tegantung dalam strategi planning suatu organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan tersebut sehingga diperoleh hasil pengelolaan yang baik. Kinerja dalam suatu perusahaan merupakan suatu ukuran prestasi dari perusahaan yang bisa menghasilkan keuntungan, dimana keuntungan tersebut merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para manajer (Hadiwijoyo & Anisa, 2021).

Menurut pendapat Magdalena (2012) bahwa pengukuran kinerja keuangan tidak hanya pada indikator keuangan tetapi termasuk indikator non-keuangan berfungsi untuk melihat pengukuran tindakan kinerja keuangan dan berdampak pada peningkatan kualitas. Dengan ditambahnya perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah.

### **Tujuan Kinerja Keuangan.**

Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan (Sanjaya, 2018).

Tujuan penilaian kinerja keuangan menurut (Sanjaya, 2018):

1. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
2. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Untuk memperbaiki kinerja perlu dilakukan evaluasi. Cara untuk melakukan evaluasi adalah dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik secara umum lebih sulit untuk dikuantifikasikan dibandingkan dengan sektor privat karena sebagian hasil kinerja bersifat kualitatif.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).**

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dengan demikian, APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan (Putra & Hidayah, 2020).

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Derajat desentralisasi fiskal terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.**

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal juga menggambarkan

besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Mustika, 2017). Hal tersebut didukung dengan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Putra & Hidayah, 2020) dari hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sebelum dan setelah pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan setelah pemekaran. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zukhri, 2020) yang menunjukkan hasil derajat desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada dalam kategori sedang sampai dengan cukup. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: diduga Derajat desentralisasi fiskal terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.**

**Rasio ketergantungan keuangan daerah terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.**

Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi (Putri, 2018) . Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

Rata-rata nilai rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat jika masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan, namun tingginya kontribusi dana perimbangan tidak mampu merubah struktur belanja modal. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: diduga ketergantungan keuangan daerah tidak terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.**

**Rasio kemandirian keuangan daerah terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.**

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Lubis & Hafni, 2013). Karena itu diperlukan perhatian khusus dalam memanfaatkan nilai lebih yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam kerangka mencapai daerah otonomi yang mandiri. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: diduga kemandirian keuangan daerah tidak terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.**

**Rasio belanja operasi keuangan daerah terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.**

Rasio belanja operasi keuangan daerah adalah suatu metrik yang mengukur proporsi dari total belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk kegiatan operasional atau rutin dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari.

Rasio ini dihitung dengan membagi total belanja operasi dengan total belanja keseluruhan pemerintah daerah dan kemudian mengalikan hasilnya dengan 100 untuk

mendapatkan persentase. Rasio belanja operasi keuangan daerah memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran mereka untuk memelihara dan menjalankan fungsi pemerintahan esensial (Wibawa et al., 2017). Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Hidayah, 2020) menunjukkan hasil bahwa diukur dari rasio belanja operasi terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sebelum dan setelah pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan belanja modal (pembangunan) mengalami peningkatan setelah pemekaran.

**H4: diduga belanja operasi keuangan daerah terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.**

**Rasio belanja modal keuangan daerah terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.**

Rasio belanja modal dalam konteks keuangan daerah mencerminkan proporsi pengeluaran yang dialokasikan untuk investasi jangka panjang atau proyek-proyek pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah. Belanja modal ini mencakup pengeluaran untuk pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung publik, serta proyek-proyek lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Peningkatan rasio belanja modal dapat mencerminkan strategi pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan infrastruktur yang terus berkembang atau sebagai langkah strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal (Wibawa et al., 2017). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rusherlistyanti & Dwijayanti, 2013) menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan tingkat keserasian belanja rutin dan keserasian belanja pembangunan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro Lebih Efisien dalam Mengelola Keuangan Daerah dibandingkan Kabupaten Jombang. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H5: diduga belanja modal keuangan daerah terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.**

**Rasio efisiensi keuangan daerah terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan dua tahun setelah pandemi covid-19.**

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen (Lubis & Hafni, 2013). Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro Lebih Efisien dalam Mengelola Keuangan Daerah dibandingkan Kabupaten Jombang. Berdasar penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H6: diduga efisiensi keuangan daerah terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.**

**Rasio efektifitas keuangan daerah terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.**

Rasio efektivitas memaparkan terkait kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan kemudian disandingkan dengan target yang disetujui berdasarkan potensi nyata daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100% (Wibawa et al., 2017). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Ramadhani, 2016) dari hasil penelitian tersebut keuangan daerah terlihat pada tahun 2013 mengalami lonjakan cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan persentase 102% dimana pada tahun sebelumnya 2010 sampai dengan 2012 persentasenya hanya sebesar 85%, 86%, dan 86%. Dan kembali turun drastis pada tahun 2014 dengan persentase 85% dan kembali melonjak naik pada tahun 2015 sebesar 106%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2012, tepatnya 25 Oktober 2012 Kota Tarakan menjadi bagian dari pemekaran Provinsi baru yaitu Kalimantan Utara, yang sebelumnya Kota Tarakan tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur.

terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017 dimana Provinsi di Jawa memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari Provinsi di Sumatera. Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dalam hal ini, Provinsi di Jawa memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dari segi efektifitas karena Provinsi di Jawa memiliki realisasi pendapatan yang lebih besar daripada target pendapatan yang direncanakan. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H7: diduga efektifitas keuangan daerah terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.**

**Rasio pertumbuhan keuangan daerah terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.**

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan (Lubis & Hafni, 2013). Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meutia, 2021) menunjukkan hasil APBD Kota Langsa dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selama periode observasi mengalami angka pertumbuhan yang positif yang berarti bahwa Pemerintah Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur mampu mempertahankan dan meningkatkan Penerimaan Daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustina.A, 2012) dari hasil penelitian tersebut kinerja pengelolaan keuangan Kota Malang baik karena Pemerintah Kota Malang mampu meningkatkan pertumbuhan PAD dan pemerintah kota malang mampu meningkatkan pendapatan daerahnya. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H8: diduga pertumbuhan keuangan daerah terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiarto (2021) Penelitian kuantitatif atau yang lazim disebut dengan penelitian yang bersifat konfirmasi dan deduktif karena metode ini bersifat mengkonfirmasi antara teori dengan kenyataan yang ada dengan mendasarkan pada data yang telah dikumpulkan dengan mengikuti kaidah ilmiah.

### **Jenis dan sumber data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang memuat penelitian arsip terkait kejadian masa lalu

(Churniawati, 2019). Data sekunder yang digunakan penelitian ini yaitu laporan keuangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah pemerintahan yang mencakup laporan realisasi anggaran yang tercatat di pemerintahan Kolaka Utara, selama periode 2018-2019 dan 2021-2022.

### **Populasi dan Sumber Data**

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran tahun 2018-2019 dan 2021-2022 (Sumilat et al., 2021).

### **Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan variabel terikat yang diukur melalui rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio belanja operasi keuangan daerah, rasio belanja modal keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah. Dalam uji Hipotesis yang digunakan adalah uji paired sample t-test.

#### **Uji Paired Sample T-Test**

Uji paired sample t-test adalah uji beda parametris pada dua data yang berpasangan. Uji ini disebut juga dengan istilah pairing T-test yang digunakan sebagai uji komparatif atau perbedaan apabila skala data kedua variable adalah kuantitatif (interval atau rasio). Uji ini diperuntukkan pada uji beda atau uji komparatif yang artinya membandingkan adakah perbedaan mean atau rata-rata dua kelompok yang berpasangan.

### **Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.**

Rasio derajat desentralisasi Fiskal adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal juga menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Mustika, 2017).

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

### **Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.**

Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi (Putri, 2018).

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.**

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat



ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Lubis & Hafni, 2013).

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

#### Rasio Belanja Operasi Keuangan Daerah

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Wibawa et al., 2017).

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20% (Wibawa et al., 2017).

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen (Lubis & Hafni, 2013).

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

#### Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.

Rasio efektivitas memaparkan terkait kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan kemudian disandingkan dengan target yang disetujui berdasarkan potensi nyata daerah. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD.

Kapabilitas daerah dikatakan efektif jika rasio yang dicapai 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitasnya, semakin tinggi pula kemampuan daerahnya (Amal & Wibowo, 2022).

$$\text{Rasio Efektivitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Angaran PAD}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Hipotesis Uji Paired Sample T-Test

**Gambar 1. 2**  
**Hasil Uji Paired Sample T-Test Derajat Desentralisasi Fiskal**

Pair 1	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal_Sb – Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal_St	-.86499	,01705	,01206	-1,01817	-,71182	-71,754	1	,009

Sumber: diolah SPSS 2.1 (2023)

Variabel Dependen pada uji ini yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Berdasarkan gambar 4.2 uji Paired Sample test diatas diketahui nilai sig adalah  $0,009 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio tersebut tidak signifk. menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif atau tidak signifikan dan tidak terdapat perbedaan pada laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi *covid-19*, yang berarti pemerintah daerah kolaka utara tidak terkena dampak dari pengaruh pandemi *covid-19* karena kenaikan tiap tahunnya sangat minim antara tahun sebelum dan tahun setelah. Hal ini menunjukan kinerja keuangan dipemerintah daerah kabupaten kolaka utara masih sangat baik dalam menghadapi pengaruh akibat pandemi covid-19. Akan tetapi masih dalam skala interval yang sangat kurang, sehingga **hipotesis pertama ditolak**.

**Gambar 1. 3**  
**Hasil Uji Paired Sample T-Test Ketergantungan Keuangan Daerah**

Pair 1	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah_Sb - Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah_St	0,01005	0,00321	0,00227	-0,01878	0,03889	4,43	1	0,141

Sumber: diolah SPSS 2.1 (2023)

Variabel Dependen pada uji ini yaitu Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Berdasarkan gambar 4.3 uji Paired Sample test diatas diketahui nilai sig adalah  $0,141 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio tersebut tidak signifikan. menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif atau tidak signifikan dan tidak terdapat perbedaan pada laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi *covid-19*, yang berarti pemerintah daerah kolaka utara tidak terkena dampak dari pengaruh pandemi *covid-19* karena kenaikan dan penurunan tiap tahunnya sangat minim antara tahun sebelum dan tahun setelah. Hal ini menunjukan kinerja keuangan dipemerintah daerah kabupaten kolaka utara masih

sangat baik dalam menghadapi pengaruh akibat pandemi covid-19. Akan tetapi masih dalam skala interval yang sangat tinggi, sehingga **hipotesis kedua ditolak**.

**Gambar 1. 4**  
**Hasil Uji Paired Sample T-Test Kemandirian Keuangan Daerah**

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
Pair 1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah_Sb - Rasio Kemandirian Keuangan Daerah_St	-0,0118	0,0023	0,00163	-0,03249	0,0089	-7244	1	0,087

Sumber: diolah SPSS 2.1 (2023)

Variabel Dependen pada uji ini yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan gambar 4.4 uji Paired Sample test diatas diketahui nilai sig adalah  $0,087 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio tersebut tidak signifikan. menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif atau tidak signifikan dan tidak terdapat perbedaan pada laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi *covid-19*, yang berarti pemerintah daerah kolaka utara tidak terkena dampak dari pengaruh pandemi *covid-19* karena kenaikan tiap tahunnya sangat minim antara tahun sebelum dan tahun setelah. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan dipemerintah daerah kabupaten kolaka utara masih sangat baik dalam menghadapi pengaruh akibat pandemi covid-19. Akan tetapi masih dalam skala interval yang rendah sekali, sehingga **hipotesis ketiga ditolak**.

**Gambar 1. 5**  
**Hasil Uji Paired Sample T-Test Belanja Operasi Keuangan Daerah**

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
Pair 1 Rasio Belanja Operasi_Sb - Rasio Belanja Operasi_St	0,17191	0,10563	0,07469	-0,77716	1,12098	2,302	1	0,261

Sumber: diolah SPSS 2.1 (2023)

Variabel Dependen pada uji ini yaitu Rasio Belanja Operasi. Berdasarkan gambar 4.5 uji Paired Sample test diatas diketahui nilai sig adalah  $0,261 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio tersebut tidak signifikan. menunjukkan bahwa belanja operasi keuangan daerah berpengaruh negatif atau tidak signifikan dan tidak terdapat perbedaan pada laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi *covid-19*, yang berarti pemerintah daerah kolaka utara tidak terkena dampak dari pengaruh pandemi *covid-19* karena penurunan tiap tahunnya sangat minim antara tahun sebelum dan tahun setelah dimana terjadi kenaikan ditahun 2022 meskipun nilainya kecil. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan dipemerintah daerah kabupaten kolaka utara masih sangat baik dalam menghadapi pengaruh akibat pandemi covid-19, sehingga **hipotesis keempat ditolak**.

**Gambar 1. 6**  
**Hasil Uji Paired Sample T-Test Belanja Modal Keuangan Daerah**

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
Pair 1 Rasio Belanja Modal_Sb - Rasio Belanja Modal_St	0,02469	0,10221	0,07228	-0,89367	0,94306	0,342	1	0,790

Sumber: diolah SPSS 2.1 (2023)

Variabel Dependen pada uji ini yaitu Rasio Belanja Modal. Berdasarkan gambar 4.6 uji Paired Sample test diatas diketahui nilai sig adalah  $0,790 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio tersebut tidak signifikan. menunjukkan bahwa belanja modal keuangan daerah berpengaruh negatif atau tidak signifikan dan tidak terdapat perbedaan pada laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi *covid-19*, yang berarti pemerintah daerah kabupaten kolaka utara tidak terkena dampak dari pengaruh pandemi *covid-19*, karena kenaikan dan penurunan tiap tahunnya sangat minim antara tahun sebelum dan tahun setelah. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan dipemerintah daerah kabupaten kolaka utara masih sangat baik dalam menghadapi pengaruh akibat pandemi covid-19, sehingga **hipotesis kelima ditolak**.

**Gambar 1. 7**  
**Hasil Uji Paired Sample T-Test Efisiensi Keuangan Daerah**

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
Pair 1 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah_Sb - Rasio Efisiensi Keuangan Daerah_St	4,09137	5,91153	4,18009	-49,02166	57,2044	0,979	1	0,507

Sumber: diolah SPSS 2.1 (2023)

Variabel Dependen pada uji ini yaitu Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Berdasarkan gambar 4.7 uji Paired Sample test diatas diketahui nilai sig adalah  $0,507 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio tersebut tidak signifikan. menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif atau tidak signifikan dan tidak terdapat perbedaan pada laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi *covid-19*, yang berarti pemerintah daerah kolaka utara tidak terkena dampak dari pengaruh pandemi *covid-19* karena kenaikan tiap tahunnya sangat minim antara tahun sebelum dan tahun setelah. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan dipemerintah daerah kabupaten kolaka utara masih sangat baik dalam menghadapi pengaruh akibat pandemi covid-19. Akan tetapi masih dalam skala interval yang tidak efisien, sehingga **hipotesis keenam ditolak**.

**Gambar 1. 8**  
**Hasil Uji Paired Sample T-Test Efektivitas Keuangan Daerah**

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
Pair 1 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah_Sb - Rasio Efektivitas Keuangan Daerah_St	-0,00948	0,14194	0,10036	-1,28473	1,26577	-0,094	1	0,940

Sumber: diolah SPSS 2.1 (2023)

Variabel Dependen pada uji ini yaitu Rasio Efektivitas Keuangan Daerah. Berdasarkan gambar 4.8 uji Paired Sample test diatas diketahui nilai sig adalah  $0,940 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio tersebut tidak signifikan. menunjukkan bahwa efektivitas keuangan daerah berpengaruh negatif atau tidak signifikan dan tidak terdapat perbedaan pada laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi *covid-19*, yang berarti pemerintah daerah kolaka utara tidak terkena dampak dari pengaruh pandemi *covid-19* karena kenaikan dan penurunan tiap tahunnya sangat minim antara tahun sebelum dan tahun setelah. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan dipemerintah daerah kabupaten kolaka utara masih

sangat baik dalam menghadapi pengaruh akibat pandemi covid-19 dengan skala interval yang sangat efektif, sehingga **hipotesis ketujuh ditolak**.

**Gambar 1. 9**  
**Hasil Uji Paired Sample T-Test Pertumbuhan Keuangan Daerah**

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
Pair 1 Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah_Sb - Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah_St	-0,17149	0,41765	0,29532	-3,92395	3,58097	-0,581	1	0,665

Sumber: diolah SPSS 2.1 (2023)

Variabel Dependen pada uji ini yaitu Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Berdasarkan gambar 4.9 uji Paired Sample test diatas diketahui nilai sig adalah  $0,665 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio tersebut tidak signifikan. menunjukkan bahwa pertumbuhan keuangan daerah berpengaruh negatif atau tidak signifikan dan tidak terdapat perbedaan pada laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pandemi *covid-19*, yang berarti pemerintah daerah kolaka utara tidak terkena dampak dari pengaruh pandemi *covid-19* karena kenaikan tiap tahunnya sangat minim antara tahun sebelum dan tahun setelah dimana terjadi minus ditahun 2018 dan 2022. Hal ini menunjukan kinerja keuangan dipemerintah daerah kabupaten kolaka utara masih cukup baik dalam menghadapi pengaruh akibat pandemi covid-19, sehingga **hipotesis kedelapan ditolak**.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pada pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal setelah pandemi covid-19, hal ini berarti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kolaka utara setelah covid-19 tidak memiliki pengaruh yang signifikan, Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah setelah pandemi covid-19, hal ini berarti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kolaka utara setelah covid-19 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah setelah pandemi covid-19, hal ini berarti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kolaka utara setelah covid-19 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Belanja Operasi Keuangan Daerah setelah pandemi covid-19, hal ini berarti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kolaka utara setelah covid-19 tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Belanja Modal Keuangan Daerah setelah pandemi covid-19, hal ini berarti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kolaka utara setelah covid-19 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Efisiensi Keuangan Daerah setelah pandemi covid-19, hal ini berarti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kolaka utara setelah covid-19 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Efektivitas Keuangan Daerah setelah pandemic covid-19, hal ini berarti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kolaka utara setelah covid-19 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Pertumbuhan Keuangan Daerah setelah pandemi covid-19, hal ini berarti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kolaka utara setelah covid-19 tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Keterbatasan data historis keuangan pemerintah daerah Kolaka Utara dapat membatasi analisis tren jangka panjang dan pengidentifikasian perubahan struktural dalam kinerja keuangan. Variabilitas faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan ekonomi nasional atau pendanaan pusat, dapat memberikan pengaruh tambahan yang sulit untuk dikendalikan. Keterbatasan pada penelitian hanya pada pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara dapat membatasi generalisasi temuan untuk mencerminkan situasi lebih luas.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, R. (2018). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengaanggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya (Studi Kasus Pada Cv. Citra Niaga Cemerlang Baubau).
- Agustina.A, O. (2012). analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian di ERA otonomi Daerah: Studi kasus kota malang (tahun anggaran 2007-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1.2.
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, Adanya pan, 83-93.
- Anik, A. P. (2013). Evaluasi penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya produksi. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Manajemen Unud*, 7(2), 1080-1110.
- Bulutoding, L., & Akbar, M. R. (2018). Perbandingan Kinerja dan Pengungkapan Etika Islam pada PT Bank Muamalat dengan PT Bank BRI Syariah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Bulutoding, L., & Sharon, S. S. (2023). Manifestasi Surah Al-Kahfi Pada Praktik Akuntansi Manajemen Perkebunan Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 165-181.
- Bulutoding, L., Bidin, C. R. K., Syariati, A., & Qarina, Q. (2021). Antecedents and Consequence of Murabaha Funding in Islamic Banks of Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 487-495.
- Churniawati, N. (2019). Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Amnesti Pajak: Suatu Analisis Komparatif di Industri Otomotif. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 8-13.
- Fathiyah, F., Sukmana, A., Majid, H., & Masnun, M. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *J-Mas (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 117-122.
- Hadist Riwayat Thabrani
- Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2021). *Pelayanan Publik* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Halim, H., Aspan, Z., & Razak, K. (2022). Pencegahan Dan Pengendalian Pandemi Covid-19. *Cv. Eureka Media Aksara*.
- Hidayat, M. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. 24-30.
- Hidayat, M. (2021b). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan Sebelum Dan Disaat Pandemi Covid 19. *Journal Measurement*, 15, 9-17.
- Jambi, B. P. S. P. (2021). Analisis pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi dengan uji statistik Mc Nemar. 16(3), 503-516.
- Junaidi, L. D., Siregar, L. H., & Anan, M. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Fluktuasi Harga Saham dan Volume Transaksi Saham pada Perusahaan Subsektor Telekomunikasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 73.
- Khotimah, K. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19.
- Lubis, P. K. D., & Hafni, N. (2013). Analisis Rasio Keuangan Untuk Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013.
- Lumenta, M., Gamaliel, H., & Latjandu, L. D. (2021). Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Comparative Analysis Of The Financial Performance Of Transportation Companies Before And During Covid-19 Pandemic Oleh: Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis *Jurnal EMBA Vol. 9 No. 3 Juli 2021* , Hal. 341-3. *Jurnal EMBA*, 9(3), 341-354.
- Maith, H. A. (2013). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt.Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 1(3), 619-628.
- Marlianita, Y. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi , Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah , Dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat The Effect of Degree of Decentralization Ratio , Regio. *Jurnal Indonesian Accounting Research*, 1(1), 25-35.
- Martini, K., & Dwirandra, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 426-443.
- Meutia, T. (2021). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa Dengan

- Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
- Munawir, S. (2007). Analisa Laporan Keuangan.
- Mustika, A. (2017). Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Dan Debt Service Coverage Ratio (Dscr) Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013 – 2017.
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Inovasi*, 17(1), 184–197.
- Nuraini, F., Andi, K., Amelia, Y., Dharma, F., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Lampung, U. (2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. 24.
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–6.
- PH, Liana., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesia Journal Of Nursing and Health Sciences*, 1, 37–48.
- Putra, B. P., & Hidayah, R. U. (2020). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten / Kota Sebelum dan Setelah Pemekaran Daerah Sumatera Selatan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(1), 19–26.
- Putra, N. G., & MUDAKIR, Y. B. (2011). Pengaruh belanja modal dan belanja operasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah [PhD Thesis, Universitas Diponegoro].
- Putri, I. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Serang. 1–107.
- Ramadhani, F. R. (2016). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 85.
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. 4(6), 1897–1913.
- Rusherlistyanti, R., & Dwijayanti, R. (2013). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Seindonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pekalongan*, 12(1), 43–66.
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2016). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Sanjaya, S. (2018). Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Taspen (persero) Medan. 2.
- Sayadi, M. H. (2021). Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 159–171. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.269>
- Siswati, A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 pada Kinerja Keuangan (Studi kasus pada Perusahaan Teknologi yang Listing di BEI). *Jurnal Llmah Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1)(1), 64–73.
- Sitorus, J. H. E. (2016). Pancasila-based social responsibility accounting. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 700–709.
- Sriwiyanti, E., Okto, E., Damanik, P., & Martina, S. (2021). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan Properti dan Real Estate di BEI. 5(2).
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81–92.
- Sumilat, A. G., Mangantar, M., & Maramis, J. B. (2021). Komparasi Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Otomotif Di BEI (Studi Pada Perusahaan Dengan Single Segmen Vs Multi Segmen). *Jurnal Emba*, 9(1), 787–796.
- Tarjunajah, & Wiratno, A. (2018). Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah SeJabodetabek. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* 5(2), 175-187
- Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1).
- Vebiani, D., Nugraha, & Hardiana, R. D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID- 19 ( Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota

- Provinsi Jawa Barat ). 1(1).
- Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi Publik* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Wibawa, D. T., Ruslin, Hasbudin, & Dharmawati, T. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian ( WDP ) di Provinsi Sulawesi Tenggara. 1–36.
- Wulandari, D. H. N. (2016). Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Pusat Laba Sebagai Alat Pengendalian dan Penilaian Kinerja Manajer [PhD Thesis, Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember]
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149..